

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R. D., & Haryanto, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 702712.
- Benhart, S.W., dan Rosenstein S. (1998). Board Composition, managerial ownership, and Firm performance: an empirical analysis. *Financial Review* 33, pp. 116
- Budianto, Wendy. (2012). Pengaruh opini, temuan audit, dan gender terhadap kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia 2008-2010. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. Dan Williamson, J. (1998). The balanced scorecard: a Potent tool for energizing and focusing health-care organization management. *Journal of Health-care Management*, pp. 263.
- Chtourou, Sonda Marrakchi, Jean Bedard dan Lucie Courteau. (2001). Corporate governance And earnings management. *Working paper*, April.
- De Janvry, Alaim & Finan, Frederico S. & Sadoulet, Elisabeth. (2010). Local electoral Incentives and decentralized program performance. IZA Discussion paper 5382, Institute for the Study of Labor (IZA).
- Kusumawardani, Media. (2012). *Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage Terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia. Accounting Anaysis Journal I*. Universitas Negeri Semarang.
- Lake, David, and Matthew Bum. (2001). The invisible hand democracy: political control and The provision of public services. August I.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyeler, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial Reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public*.
- Mahmudi. (2010). *The analysis of entrepreneurial leader on local government performance*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. (2001). Keputusan presiden republik indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia

- Republik Indonesia. (2008). Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2009 tentang mpr, dpr, Dpd, dan dprd. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 73 Tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh arakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja Keuangan pemerintah deaerah: srudi epiris pada pemerintah daerah kabupaten/kotadi Indonesia.. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sutaryo da Winarma, J. (2013). Karakteristik dprd dan kinerja penyenglenggaraan pemerintah daerah: dukungan empiris dari perspektif teori keagenan. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
- Wicaksono, Panggah. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini dan temuan audit bp atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia tahun 2008-2009. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Winarma, J and Murni, S. (2007). Pengaruh personal background, political background, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah (studi kasus di karesidenan surakarta dan daerah istimewa yogyakarta tahun 2006). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.